



Selvi | LITERASI KEUANGAN MASYARAKAT



LITERASI KEUANGAN MASYARAKAT
Pahami Investasi Keuangan Anda

Selvi



IP.080.12.2018

LITERASI KEUANGAN MASYARAKAT
Pahami Investasi Keuangan Anda

Selvi

Pertama kali diterbitkan pada Desember 2018
oleh **Ideas Publishing**

Alamat: Jalan Ir. Joesoef Dalie No. 110 Kota Gorontalo
Surel: infoideaspublishing@gmail.com
Anggota IKAPI, No. 0001/ikapi/gtlo/II/17

ISBN: 978-602-5878-57-2

Penyunting: Nur Fitri Yanuar Misilu
Penata Letak: Siti Rahmatia Ntou
Sampul: Wisnu Wijanarko

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
PRAKATA	v
BAB I Literasi Keuangan	
A. Pengertian Literasi Keuangan	1
B. Mengapa Literasi Keuangan Penting?	7
C. Siapa yang Harus Memahami Literasi Keuangan	10
BAB II Kerangka Nasional Keuangan Inklusif	
A. Edukasi Keuangan	13
B. Pemetaan Informasi Keuangan	17
C. Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Otoritas Jasa Keuangan Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan ...	20
BAB III Aspek-Aspek Literasi Keuangan	
A. Pengetahuan Dasar mengenai Keuangan Pribadi (<i>Basic Personal Finance</i>)	32
B. Manajemen Uang.....	32
C. Manajemen Kredit dan Utang.....	33
D. Tabungan	34
E. Investasi	34
F. Manajemen Resiko	35

BAB IV	Strategi Finansial Literasi di Indonesia.....	37
BAB V	Produk Keuangan dan Produk Perbankan	
A.	Pengetahuan Umum tentang Produk- Produk Keuangan dan Investasi	41
B.	Pengetahuan dan Aksesibilitas terhadap Produk Perbankan	51
BAB VI	Responden Literasi Keuangan	
	Karakteristik Demografi Responden.....	57
BAB VII	Rencana Literasi Keuangan Kedepannya ..	67
BAB VII	Literasi Keuangan di Gorontalo.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71

PRAKATA

Ucapan syukur alhamdulillah mengawali pembuka kata dari penulis. Tiada yang patut dipuji selain Allah *subhanahu wa ta'ala* karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan buku ini.

Permasalahan keuangan menjadi suatu hal penting yang bagi setiap orang. Kesalahan dalam pengelolaan keuangan, penggunaan kartu kredit yang tidak tepat, dan keterbatasan finansial menjadi masalah penting yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Penyelesaian dari masalah ini pun cenderung harus mendapat perhatian vital dari setiap orang yang terlibat.

Buku ini pun kemudian hadir untuk membahas secara lengkap tentang kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Tidak lain adalah dengan pendedukasian literasi keuangan bagi masyarakat. Dengan adanya literasi keuangan diharapkan dapat menjadi kunci bagi setiap konsumen untuk dapat cerdas dalam mengelola keuangannya.

Tidak ada yang sempurna dari setiap tulisan. Ketidaksempurnaan merupakan bagian dari ketidaktahuan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu diharapkan demi terwujudnya pengelolaan literasi keuangan yang lebih baik lagi ke depannya.

Akhirnya tiada kata yang patut terlantun dari penulis selain ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan buku ini dari awal sampai akhir. Semoga segala apa yang telah diusahakan akan bernilai pahala di sisi Allah *subhanahu wa ta'ala*. Aamiin.

Gorontalo, Desember 2018

Penulis

Bab I

Literasi Keuangan

A. Pengertian Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Kesulitan keuangan bukan hanya fungsi dari pendapatan semata (rendahnya pendapatan), kesulitan keuangan juga dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan (*miss-management*) seperti kesalahan penggunaan kredit, dan tidak adanya perencanaan keuangan. Keterbatasan finansial dapat menyebabkan stres dan rendahnya kepercayaan diri, bahkan untuk



sebagian keluarga kondisi tersebut dapat berujung pada perceraian.

Memiliki literasi keuangan, merupakan hal vital untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan berkualitas. Lebih lanjut dijelaskan bahwa literasi keuangan bersama-sama dengan kemampuan membaca dan matematik merupakan kunci untuk dapat menjadi konsumen yang cerdas, mengelola kredit, dan mendanai pendidikan tinggi, *saving* dan *investing*, dan warga negara yang bertanggung jawab.

Keuangan inklusif didefinisikan sebagai “Hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat dengan perhatian

khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migran, dan penduduk di daerah terpencil” (Bank Indonesia, 2014).

Definisi lain terkait *financial inclusion* (World Bank, 2008) dalam Supartoyo dan Kasmiati (2013) adalah suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan baik dalam bentuk harga ataupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan.

Tujuan utama dalam strategi nasional keuangan inklusif adalah untuk mencapai kesejahteraan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia dengan menciptakan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat (Menurut Kementerian Keuangan RI, 2013).

Menurut Lusardi (2008) yang dikutip dalam Nababan dan Isfanti (2013) *Personal financial literacy* didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai konsep-konsep keuangan. Berdasarkan definisi lain *financial literacy* atau biasa disebut dengan kemelekan finansial adalah kemampuan seseorang dalam memahami pengetahuan

Berbagai aspek mengenai keuangan yaitu meliputi simpanan, pinjaman, investasi, perencanaan keuangan, dan mempunyai keahlian dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimilikinya untuk membuat keputusan yang efektif tentang keuangan demi kesejahteraan. *Financial literacy* sangat erat kaitannya dengan kecerdasan finansial. Seseorang yang melek secara finansial akan mengantarkan individu ke tingkat kecerdasan finansial tertentu. Hal ini disebabkan karena kecerdasan finansial umumnya selalu ditunjang

dengan pengetahuan yang cukup mengenai aspek-aspek finansial. Individu yang cerdas secara finansial, dapat mengelola aset dan mengumpulkan kekayaan secara lebih efektif tergantung pada tingkat kecerdasan finansial yang dimiliki orang tersebut. Dari beberapa definisi tersebut maka literasi keuangan dapat diartikan sebagai berikut.

1. Literasi keuangan adalah penguasaan pengetahuan dan kemampuan (*skills*) untuk membuat keputusan ekonomik dan keuangan secara rasional dengan penuh keyakinan dan kompeten (*Working Group on Financial Literacy, 2010*).
2. Literasi keuangan terjadi manakala seorang individu yang cakap (*literate*) adalah seseorang yang memiliki sekumpulan keahlian dan kemampuan yang membuat orang tersebut

mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan (Krishna et al., 2010).

3. Suatu gabungan antara kesadaran, pengetahuan, *skill*, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat dan mencapai kesejahteraan keuangan individu. (INFE-OECD, 2011).
4. Sebagai bagian dari ilmu keuangan, literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam keuangan pribadi (*personal finance*) yang meliputi manajemen uang/dana, pembelanjaan dan kredit, tabungan dan investasi (Hananto, 2011).



B. Mengapa Literasi Keuangan Penting?

Kebutuhan individu dan produk finansial yang semakin kompleks menuntut masyarakat untuk memiliki *financial literacy* yang memadai. Memiliki penguasaan ilmu serta *skill* di bidang keuangan mendorong individu untuk memahami dan terlibat isu-isu nasional di bidang keuangan seperti biaya perawatan kesehatan, pajak, investasi, dan memiliki akses ke dalam sistem keuangan. Kurangnya literasi keuangan dapat mengakibatkan rendahnya akses ke lembaga keuangan dan menghambat kemakmuran, sebab menurut calon anggota Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Soetiono, akses yang luas ke sistem keuangan atau sistem keuangan yang mencakup usaha mikro, masyarakat miskin dan kaum wanita, serta rumah tangga produktif, maka bisa menurunkan

perbedaan pendapatan diantara masyarakat (Kompas, 13 Juni 2012).

Indonesia termasuk salah satu negara dengan kondisi literasi keuangan masyarakatnya yang rendah. Menurut Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Kusumaningtuti Soetiono, yang dikutip Kusuma (2014) mengatakan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia, bahkan di bawah Thailand. Di Malaysia, tingkat literasi keuangan masyarakatnya mencapai 66%, Singapura mencapai 98%, sedangkan Thailand mencapai angka 73%, sementara Indonesia masih pada angka 28%. Bahkan hal ini diperkuat oleh hasil survei indeks Master Card (2014) yang menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan Indonesia merupakan yang terendah ke-3 dari negara-negara Asia Pasifik.

Survei World Bank tahun 2010 menunjukkan separuh penduduk Indonesia tidak memiliki akses atas layanan lembaga keuangan formal. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem keuangan belum berjalan secara optimal serta masih adanya ruang untuk perbaikan dalam rangka peningkatan akses masyarakat kepada layanan lembaga keuangan. Melihat kondisi tersebut, pada bulan Juni 2012, Bank Indonesia bekerjasama dengan Sekretariat Wakil Presiden-Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengeluarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Dalam rangka pelaksanaan program Keuangan Inklusif, Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah menyusun Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang salah satu pilar utamanya adalah Edukasi Keuangan

yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat melek keuangan masyarakat Indonesia (*financial literacy*).

C. Siapa yang Harus Memahami Literasi Keuangan

Kemelekan finansial (*financial literacy*) merupakan salah satu faktor penentu kesejahteraan individu dan secara tidak langsung memengaruhi tingkat perkembangan ekonomi masyarakat. Berbagai studi yang dilakukan menunjukkan terdapat kaitan yang positif antara tingkat *financial literacy* masyarakat dengan kondisi ekonomi suatu negara.

Melihat pentingnya *financial literacy* tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia mendorong peningkatan kondisi *financial literacy* masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Selain itu, *financial*



literacy merupakan salah satu pilar dalam kebijakan pencapaian *financial inclusion* di Indonesia.

Maka dengan urgensi tersebut, masyarakat sebagai bagian dari Indonesia harus memahami dengan baik tentang persoalan literasi keuangan ini. Sosialisasi dan edukasi pun dapat dilakukan untuk lebih memahamkan masyarakat terkait dengan literasi keuangan ini.



12

**LITERASI
KEUANGAN
MASYARAKAT**



Bab II

Kerangka Nasional Keuangan Inklusif

A. Edukasi Keuangan

Visi nasional keuangan inklusif dirumuskan untuk mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Visi keuangan inklusif tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan berikut.



1. Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. Keuangan inklusif adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih luas, yaitu penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta bagian dari strategi untuk mencapai stabilitas sistem keuangan. Kelompok miskin dan marjinal merupakan kelompok yang memiliki keterbatasan akses ke layanan keuangan. Tujuan keuangan inklusif adalah memberikan akses ke jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, namun terdapat kebutuhan untuk memberikan fokus lebih besar kepada penduduk miskin.

2. Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep keuangan inklusif harus dapat memenuhi semua kebutuhan yang berbeda dari segmen penduduk yang berbeda melalui serangkaian layanan holistik yang menyeluruh.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan. Hambatan utama dalam keuangan inklusif adalah tingkat pengetahuan keuangan yang rendah. Pengetahuan ini penting agar masyarakat merasa lebih aman berinteraksi dengan lembaga keuangan.
4. Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Hambatan bagi orang miskin untuk mengakses layanan keuangan umumnya berupa masalah geografis dan kendala administrasi. Menyelesaikan permasalahan



tersebut akan menjadi terobosan mendasar dalam menyederhanakan akses ke jasa keuangan.

5. Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non bank. Pemerintah harus menjamin tidak hanya pemberdayaan kantor cabang, tetapi juga peraturan yang memungkinkan perluasan layanan keuangan formal. Oleh karena itu, sinergi antara Bank, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi penting khususnya dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan.
6. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas cakupan layanan keuangan. Teknologi dapat mengurangi biaya transaksi dan memperluas

sistem keuangan formal melampaui sekadar layanan tabungan dan kredit. Namun, pedoman dan peraturan yang jelas perlu ditetapkan untuk menyeimbangkan perluasan jangkauan dan risikonya.

B. Pemetaan Informasi Keuangan

World Bank (2010) mengungkapkan setidaknya terdapat empat jenis layanan jasa keuangan yang dianggap vital bagi kehidupan masyarakat yakni:

1. layanan penyimpanan dana;
2. layanan kredit;
3. layanan sistem pembayaran dan;
4. asuransi termasuk di dalamnya dana pensiun.

Keempat aspek inilah yang menjadi persyaratan mendasar yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Peningkatan akses masyarakat kepada lembaga keuangan tersebut tentunya merupakan masalah kompleksitas yang memerlukan koordinasi lintas sektoral yang melibatkan otoritas perbankan, jasa keuangan non bank, dan kementerian atau lembaga lain yang menaruh perhatian pada upaya pengentasan kemiskinan, sehingga diperlukan kebijakan komprehensif serta menyeluruh dalam suatu Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Adapun kerangka Strategi Nasional Keuangan Onklusif (DNKI) secara lengkap dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF

Mencapai kesejahteraan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan & stabilitas sistem keuangan di Indonesia dengan menciptakan sistem keuangan yg dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat



Intermediasi seimbang, ketahanan sistem keuangan, market efisien

TUJUAN
DAMPAK
TARGET
PILAR
PROGRAM



Gambar 2.1
Kerangka Strategi Nasional Keuangan Inklusif



C. Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Rancangan Otoritas Jasa Keuangan Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan

1. Komitmen

Dalam menjalankan peraturan dan kebijakan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan diperlukan suatu komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan yakni otoritas dan industri sektor jasa keuangan. Terkait kegiatan literasi keuangan, Amerika Serikat menerjemahkan komitmen ini dengan memberikan mandate kepada kongres melalui *fair and accurate credit transactions act* untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap program inklusi keuangan yang dijalankan oleh industri sektor jasa keuangan dan pihak lain yang terlibat.



2. Kelembagaan

Pokok peraturan terkait kelembagaan mengacu pada kewajiban untuk melakukan pembentukan fungsi atau unit literasi dan inklusi keuangan yang ditunjukkan untuk membuat komitmen PUJK dalam usaha peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Berdasarkan pengalaman di Negara India, Reserve Bank of India selaku bank sentral menerbitkan surat edaran mengenai financial literacy and kredit *Counselling Center* (FLCCs)- Model *Scheme* yang mendorong bank-bank di India, baik secara tunggal atau bersama-sama, untuk membuka pusat literasi keuangan yang ditujukan untuk mempromosikan *financial literacy* dan *credit counseling* (FLCC). Merujuk pada praktek di India tersebut, telah disusun peraturan kelembagaan terkait literasi dan



inklusi keuangan dalam bentuk peraturan sebagai berikut:

- a. PUJK wajib membentuk fungsi atau unit untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan atau inklusi keuangan
- b. Pembentukan fungsi atau unit dapat melekat pada fungsi atau unit lain kecuali pada fungsi atau unit manajemen risiko, audit internal dan kepatuhan.
- c. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan atau inklusi keuangan pada fungsi atau unit dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak lain.
- d. Dalam hal PUJK merupakan konglomerasi keuangan, pembentukan unit literasi

keuangan dan inklusi keuangan dapat dilakukan secara terintegrasi

- e. Fungsi atau unit literasi keuangan memiliki tugas, paling kurang;
 - 1) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan literasi keuangan
 - 2) Melakukan pemantauan atau evaluasi atas pelaksanaan kegiatan literasi keuangan
 - 3) Memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk atau layanan jasa keuangan
- f. Dalam hal PUJK memiliki fungsi atau unit inklusi keuangan, maka pembentukan fungsi atau unit inklusi keuangan dapat digabungkan dengan fungsi atau unit literasi keuangan.



- g. Jangka waktu pembentukan unit atau fungsi literasi keuangan dan inklusi keuangan paling lama 1 tahun setelah diberlakukannya POJK
- h. PUJK existing diberikan untuk dapat membentuk fungsi inklusi keuangan yang terdiri dari beberapa unit yang berbeda. Dalam Hal ini, fungsi inklusi keuangan dapat dijalankan oleh. Misalnya, unit pengembangan infastruktur, unit pengembangan produk dan unit lainnya yang terkait namun tetap harus terdapat coordinator yang bertugas melakukan koordinasi dari unit-unit tersebut dan bertanggung jawab terhadap kewajiban pelapor.

3. Proses Bisnis

Proses bisnis dalam peraturan mengacu pada aktivitas PUJK dalam melakukan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Dalam RPOJK tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan disektor jasa keuangan untuk konsumen atau masyarakat ini, bentuk proses bisnis telah dituangkan dalam bentuk peraturan yaitu:

- a. Ruang lingkup kegiatan edukasi keuangan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan
- b. Materi edukasi keuangan
- c. Materi edukasi keuangan disusun mencakup pada penyusunan standar materi edukasi keuangan dan dilakukan



evaluasi terhadap materi edukasi keuangan tersebut.

- d. Persiapan infrastruktur dalam edukasi keuangan mencakup pembangunan atau pengembangan media untuk mengakses materi edukasi keuangan, termasuk penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi
- e. Pelaksanaan edukasi keuangan dapat berupa outreach program, training of trainer (TOT), Training of fasilitator (TOF), Training of community (ToC), sosialisasi, workshop, konsultasi keuangan, pendampingan dan simulasi.
- f. Suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai kegiatan edukasi keuangan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, apa bila memiliki ciri-ciri yaitu adanya target

peserta, waktu penyelenggara, dapat diukur dan memiliki materi edukasi keuangan terdiri dari perencanaan keuangan dan paling sedikit 3 jenis industry keuangan yang tidak terbatas pada jenis industri keuangan PUJK penyelenggara, tetapi juga mengenai jenis industry keuangan PUJK lainnya.

- g. Kegiatan edukasi keuangan yang memberikan manfaat untuk meningkatkan kompetensi dalam melakukan penjualan produk atau layanan jasa keuangan, tidak termasuk sebagai kegiatan edukasi keuangan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan.
- h. PUJK melakukan kegiatan inklusi keuangan dengan ruang lingkup sebagai berikut:



- a) Perluasan akses produk atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat
- b) Penyediaan produk jasa layanan jasa keuangan
- i. Perluasan akses keuangan kepada masyarakat termasuk penyediaan berbagai sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus untuk mengakses produk atau layanan jasa keuangan.
- j. Menciptakan skim atau pengembangan produk atau layanan jasa keuangan
- k. Dalam hal PUJK memiliki produk atau layanan jasa keuangan sederhana termasuk produk atau layanan jasa keuangan yang berbiaya murah

4. Hak dan Kewajiban

Pokok peraturan pada bagian hak dan kewajiban mengacu pada hak dan kewajiban PUJK dalam menjalankan peraturan dan kewajiban mengenai literasi dan inklusi keuangan. Ketentuan mengenai kewajiban menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen telah diatur dalam POJK nomor:1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.



30

**LITERASI
KEUANGAN
MASYARAKAT**

Bab III

Aspek-Aspek Literasi Finansial

Financial literacy mencakup beberapa aspek dalam keuangan, yaitu pengetahuan dasar mengenai keuangan pribadi (*basic personal finance*), manajemen uang (*money management*), manajemen kredit dan utang (*credit and debt management*), tabungan dan investasi (*saving and investment*), serta manajemen risiko (*risk management*). Aspek-aspek tersebut akan diuraikan berikut ini.



A. Pengetahuan Dasar mengenai Keuangan Pribadi (*Basic Personal Finance*)

Pengetahuan dasar mengenai keuangan pribadi mencakup pemahaman terhadap beberapa hal-hal yang paling dasar dalam sistem keuangan seperti perhitungan tingkat bunga sederhana, bunga majemuk, pengaruh inflasi, *oportunity cost*, nilai waktu dari uang, likuiditas suatu aset dan lain-lain.

B. Manajemen Uang

Aspek ini mencakup bagaimana seseorang mengelola uang yang dimilikinya serta kemampuan menganalisis sumber pendapatan pribadinya. Manajemen uang juga terkait dengan bagaimana seseorang membuat prioritas penggunaan dana serta membuat anggaran.

C. Manajemen Kredit dan Utang

Ada kalanya seseorang mengalami kekurangan dana sehingga harus memanfaatkan kredit maupun utang. Semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan hidup mengakibatkan tidak semua pengeluaran dapat lagi dibiayai dengan pendapatan, seperti rumah dan kendaraan, serta biaya pendidikan. Menggunakan kredit maupun utang dapat menjadi pertimbangan untuk mengatasi hal tersebut. Dengan sumber pendanaan berupa kredit maupun utang, individu dapat mengonsumsi barang dan jasa pada saat ini, dan membayarnya di masa yang akan datang. Pengetahuan cukup yang mencakup faktor-faktor yang memengaruhi kelayakan kredit, pertimbangan dalam melakukan pinjaman, karakteristik kredit konsumen, tingkat bunga pinjaman, jangka waktu pinjaman, sumber utang atau pun kredit dan lain-



lain sangat dibutuhkan agar dapat menggunakan kredit dan utang secara bijaksana.

D. Tabungan

Tabungan (*saving*) adalah bagian pendapatan masyarakat yang tidak digunakan untuk konsumsi. Masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih besar dari kebutuhan konsumsi akan mempunyai kesempatan untuk menabung.

E. Investasi

Investasi (*investment*) adalah bagian dari tabungan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi menghasilkan barang dan jasa (produksi) yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Jika tabungan besar, maka akan digunakan untuk kegiatan menghasilkan kembali barang dan jasa (produksi). Dalam berinvestasi, terdapat banyak instrumen

investasi yang dapat dipilih individu, baik pada aset riil seperti tanah, properti, emas, maupun aset keuangan seperti saham, obligasi, sertifikat deposito, dan reksadana.

F. Manajemen Risiko

Risiko bisa didefinisikan sebagai ketidakpastian atau kemungkinan adanya kerugian finansial. Respon tiap individu berbeda-beda terhadap risiko, tergantung pengalaman masa lalu serta motivasi psikologis. Kebanyakan individu cenderung menghindari situasi yang menimbulkan rasa tidak aman ataupun tidak berkecukupan. Oleh karena itu, penting untuk dapat menghadapi risiko dengan cara yang logis dan terkendali.



36

**LITERASI
KEUANGAN
MASYARAKAT**

Bab IV

Strategi Finansial Literasi di Indonesia

Berdasarkan survei literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2013, baru sekitar 21,84% masyarakat Indonesia yang benar-benar paham mengenai Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Sementara itu dalam kategori yang lebih spesifik, hasil survei nasional literasi keuangan OJK menunjukkan bahwa baru 28% pelajar atau mahasiswa yang memiliki tingkat literasi yang baik dengan tingkat utilitasnya sebesar 44%. Dari survei ini juga terungkap bahwa informasi mengenai sektor perbankan masih mendominasi tingkat



literasi keuangan masyarakat Indonesia, sementara tingkat literasi atas produk dan layanan di sektor pasar modal masih sangat rendah, hanya sekitar 4% dengan tingkat utilisasi kurang dari 1%.

Untuk meningkatkan tingkat melek finansial masyarakat Indonesia, pihak Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan cetak biru Strategi Nasional Literasi Keuangan yang terdiri atas 3 pilar yakni:

1. Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan;
2. Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan; dan
3. Pengembangan Produk dan Jasa Keuangan.

Adapun kerangka Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) secara lengkap dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Gambar 4.1
 Kerangka Strategi Nasional Keuangan Inklusif



40

**LITERASI
KEUANGAN
MASYARAKAT**



Bab V

Produk Keuangan dan Produk Perbankan

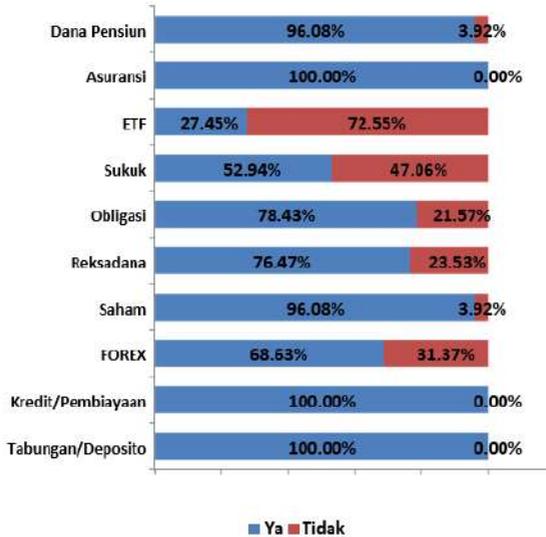
A. Pengetahuan Umum tentang Produk- Produk Keuangan dan Investasi

Dewasa ini jumlah produk keuangan dan investasi yang ditawarkan kepada masyarakat sudah cukup bervariasi. Selain produk-produk keuangan yang konvensional (tabungan, pinjaman) juga terdapat produk- produk lain baik yang ditawarkan oleh lembaga keuangan perbankan maupun yang non-perbankan. Sangat bervariasinya produk-produk keuangan dan investasi tersebut harus disikapi dengan bijak oleh masyarakat agar



nantinya tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri.

Tingkat pengenalan masyarakat Kota Gorontalo mengenai berbagai macam produk keuangan dan investasi dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Gambar 5.1

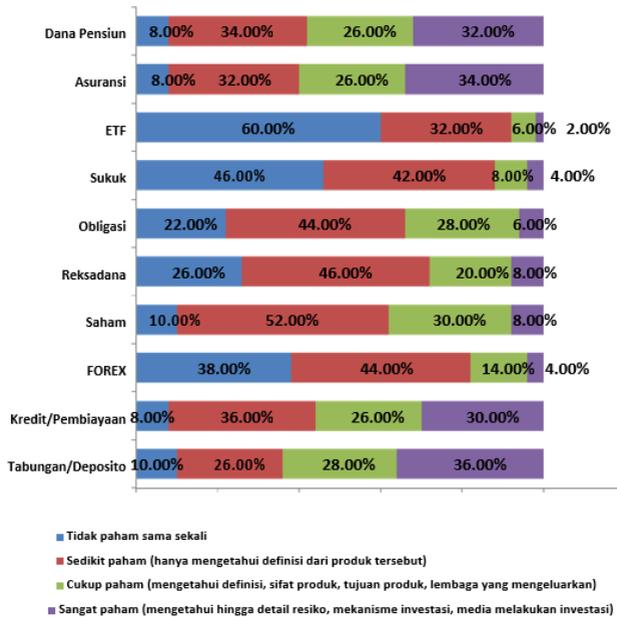
Grafik Tingkat Pengenalan Masyarakat Gorontalo terhadap Produk Keuangan dan Investasi

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa tingkat pengenalan masyarakat Kota Gorontalo terhadap produk keuangan cukup bervariasi. Untuk produk-produk keuangan yang bersifat konvensional (tabungan, pinjaman, asuransi, dan dana pensiun), tingkat pengenalan masyarakat sangat baik. Namun untuk produk-produk keuangan non-konvensional, tingkat pengenalan yang dimiliki oleh masyarakat masih relatif rendah bila dibandingkan dengan produk keuangan konvensional. Untuk produk investasi saham tingkat pengenalan masyarakat Gorontalo sudah baik. Sedangkan untuk jenis investasi obligasi, reksadana, dan *forex*, tingkat pengenalan masyarakat Gorontalo sudah cukup baik. Sedangkan untuk jenis investasi sukuk yang notabene merupakan produk obligasi yang berprinsip syariah, tingkat pengenalan masyarakat



masih rendah. Demikian pula untuk produk investasi ETF (*Exchange Traded Fund*), tingkat pengenalan masyarakat masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan produk investasi ini masih merupakan hal yang relatif baru di Indonesia.

Sedangkan untuk tingkat pemahaman masyarakat Gorontalo terhadap berbagai produk keuangan dan investasi tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Gambar 5.2
Grafik Tingkat Pemahaman Masyarakat Gorontalo
terhadap Produk Keuangan dan Investasi

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa dari 10 produk keuangan/investasi yang ditanyakan kepada responden, masyarakat Kota Gorontalo hanya mengetahui dengan baik produk keuangan yang bersifat konvensional. Untuk produk tabungan/deposito, persentase responden yang

memahami dengan baik (minimal memahami definisi produk hingga detail profil produk keuangan) mencapai 64% dan untuk produk kredit/pembiayaan mencapai 56%. Sementara untuk produk asuransi, 60% responden telah memahami dengan baik dan untuk produk dana pensiun sebanyak 58% responden telah memahami dengan baik.

Adapun untuk produk keuangan dan investasi non-konvensional (saham, reksadana, forex, dll), tingkat pengetahuan masyarakat relatif masih sangat rendah. Untuk produk investasi saham, hanya sebanyak 38% masyarakat yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai profil dan tujuan dari investasi ini. Demikian pula untuk obligasi, hanya 34% masyarakat yang memahami dengan baik, dan untuk produk reksadana hanya sebanyak 28% masyarakat yang memiliki

pemahaman yang baik mengenai definisi, profil, dan tujuan investasi. Sedangkan untuk produk investasi sukuk, yang merupakan bentuk obligasi berprinsip syariah, hanya sebanyak 12% yang memiliki pemahaman yang baik mengenai profil dan tujuan dari investasi sukuk.

Adapun untuk produk keuangan non-konvensional lain yang berupa transaksi di pasar uang atau foreign exchange (FOREX), tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat juga masih rendah. Hanya 18% masyarakat yang memiliki pemahaman baik mengenai produk keuangan ini. Dari 18% persen tersebut, sebanyak 14% hanya mengetahui definisi dan lembaga yang menyelenggarakan. Sedangkan responden yang memahami hingga mekanisme transaksi, media melakukan transaksi serta resiko yang dapat ditimbulkan hanya sebanyak 4%.

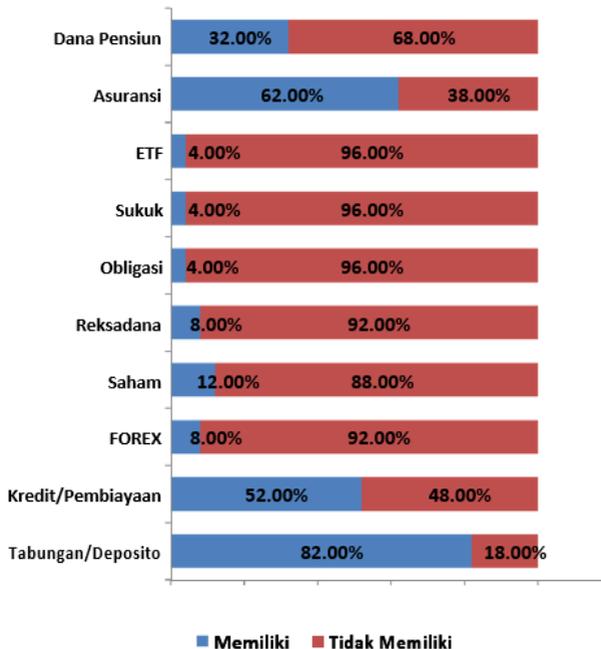


Sementara untuk produk investasi ETF yang merupakan pengembangan dari reksadana saham hanya sebanyak 8% responden yang telah memiliki pemahaman yang baik mengenai produk investasi ini. Dari 8% tersebut, sebanyak 6% memiliki pemahaman hanya sebatas definisi dan lembaga yang menyelenggarakan sedangkan responden yang memiliki pemahaman hingga ke mekanisme transaksi dan resiko yang ditimbulkan hanya sebanyak 2%.

Selain tingkat pengetahuan terhadap berbagai jenis produk keuangan dan investasi, penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai aksesibilitas masyarakat terhadap produk keuangan dan investasi yang dimaksud. Hal ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tingkat keterlibatan dan kepemilikan

masyarakat terhadap produk keuangan dan investasi tersebut.

Sebaran responden berdasarkan kepemilikan atau keikutsertaan dalam kegiatan investasi pada produk keuangan dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Gambar 5.3
Grafik Sebaran Responden Berdasarkan Kepemilikan
Produk Keuangan dan Investasi

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa tingkat aksesibilitas masyarakat yang tertinggi terdapat pada produk tabungan/deposito dengan tingkat aksesibilitas mencapai 82%. Ini berarti sebanyak 82% responden memiliki rekening di perbankan dan sisanya sebanyak 18% belum memiliki rekening tabungan di lembaga perbankan. Sedangkan untuk kredit/pembiayaan, tingkat aksesibilitas masyarakat hanya sebesar 52%. Untuk produk asuransi, tingkat aksesibilitas masyarakat mencapai 62% dan untuk produk dana pensiun tingkat aksesibilitas masyarakat hanya sebesar 32%.

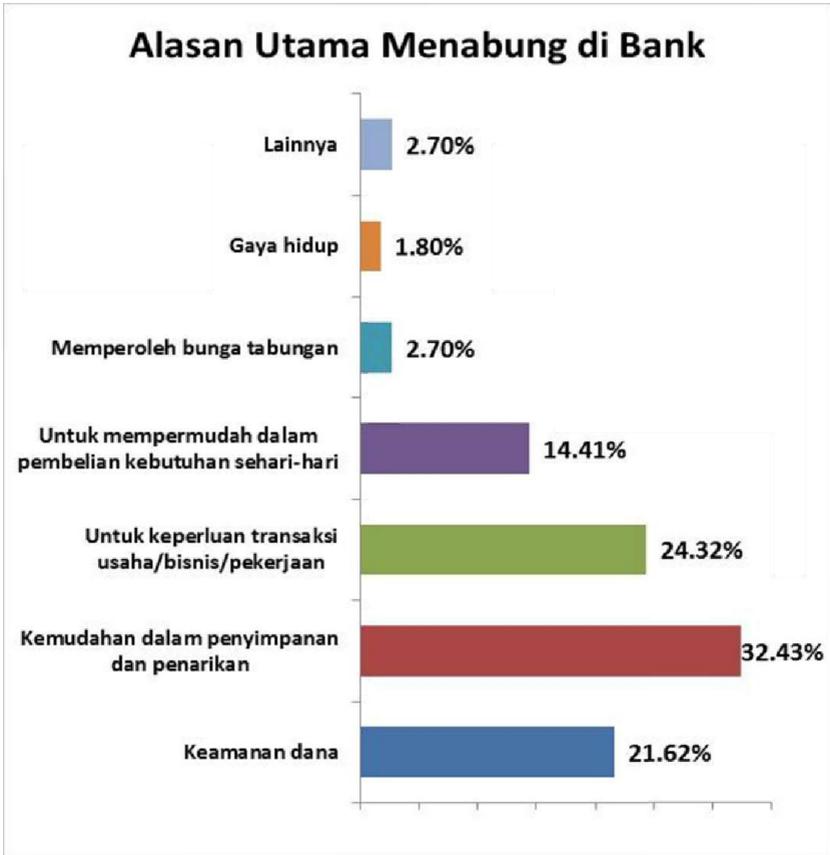
Sementara untuk produk keuangan non-konvensional, tingkat aksesibilitas masyarakat sangat rendah dimana mayoritas responden tidak pernah memiliki atau terlibat dalam kegiatan investasi pada instrumen tersebut. Dari 6 produk keuangan non-konvensional yang diamati, tingkat

aksesibilitas masyarakat terhadap instrumen saham, reksadana, dan *forex* yang relatif agak tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya (obligasi, sukuk, dan ETF).

B. Pengetahuan dan Aksesibilitas Terhadap Produk Perbankan

Dari 10 produk keuangan/ investasi yang diamati dalam penelitian ini, produk keuangan yang memiliki aksesibilitas tertinggi adalah produk tabungan/ deposito dan kredit/pembiayaan. Tingginya aksesibilitas tersebut disebabkan oleh tingkat pengetahuan masyarakat serta kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai produk-produk keuangan tersebut.

Adapun alasan utama masyarakat dalam memilih produk tabungan dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



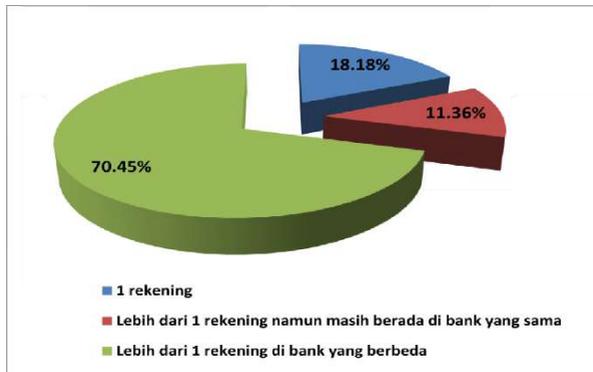
Gambar 5.4
Grafik Alasan Utama Masyarakat Memilih Produk Tabungan

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa alasan utama masyarakat dalam memilih produk tabungan adalah karena mudah dalam melakukan penyimpanan dan penarikan terhadap dana yang mereka miliki. Jangkauan lembaga perbankan yang sangat luas serta dukungan sarana berupa ATM, setor tunai, internet banking dan sms banking merupakan faktor yang turut mendukung kemudahan transaksi masyarakat sehingga akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap produk tabungan. Selain kemudahan dalam penyimpanan dan penarikan, alasan utama masyarakat untuk menabung adalah untuk mendukung kebutuhan dalam transaksi usaha/bisnis/pekerjaan. Selain itu pertimbangan keamanan dana menjadi alasan utama masyarakat lebih memilih produk tabungan yang ditawarkan oleh bank. Adanya penjamin yang dilakukan oleh



Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap dana nasabah yang disimpan di bank menjadi salah satu factor yang memperkuat keyakinan masyarakat akan keamanan dana mereka di bank.

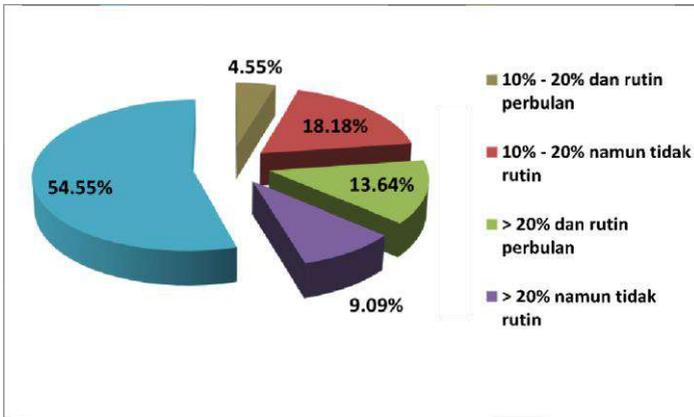
Tiga alasan utama ini yang membuat banyak masyarakat yang bahkan memiliki lebih dari satu rekening tabungan. Kepemilikan lebih dari satu rekening tabungan ini terutama untuk menyesuaikan dengan kebutuhan setiap transaksi. Dengan adanya pemisah rekening tabungan masyarakat merasa akan lebih mudah dalam melakukan pengelolaan keuangan. Sebaran kepemilikan tabungan masyarakat Gorontalo dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Gambar 5.4
Sebaran Kepemilikan Tabungan Masyarakat Gorontalo

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa sebanyak 81,82 % responden memiliki lebih dari satu rekening tabungan di mana sebanyak 70,45% memiliki rekening di bank yang berbeda dan sebanyak 11,36% memiliki lebih dari satu rekening namun masih di lembaga perbankan yang sama. Sedangkan responden yang hanya memiliki satu rekening tabungan sebanyak 18,18%.

Adapun pola masyarakat dalam menabung dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 5.5
Pola Masyarakat Gorontalo dalam Menabung

Dari gambar di atas terlihat bahwa sebanyak 54,55% masyarakat melakukan kegiatan menabung tergantung dari sisa dana yang dimiliki setiap bulan. Atau dengan kata lain persentase pendapatan yang disisihkan untuk tabungan tidak pasti disesuaikan dengan kebutuhan dana dan kondisi keuangan. Sementara sisanya sebanyak 45,45% telah menyisihkan bagian pendapatan sesuai persentase tertentu. Sebanyak 22,73% masyarakat menyisihkan

10%-20% dari pendapatan untuk ditabung dan sebanyak 22,73% menysihkan lebih dari 20% penghasilan perbulan untuk ditabung.





Bab VI

Responden Literasi Keuangan

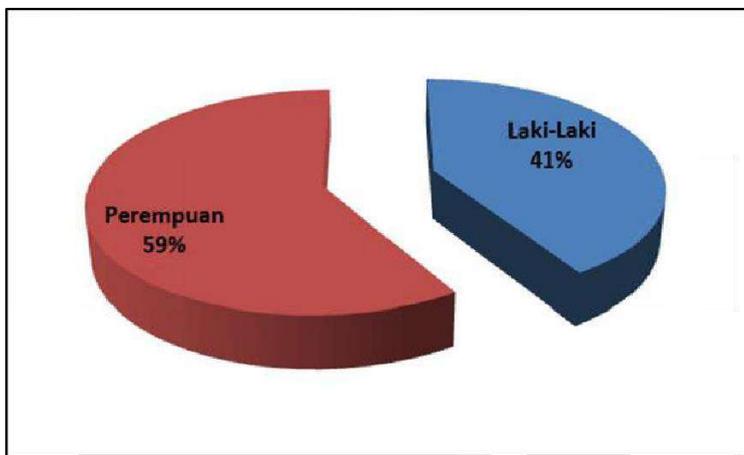
Karakteristik Demografi Responden

Dalam melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu memetakan responden ke dalam lima kriteria. Berikut penjabarannya.

1. Jenis Kelamin dan Status Perkawinan

Sebaran responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam gambar berikut.

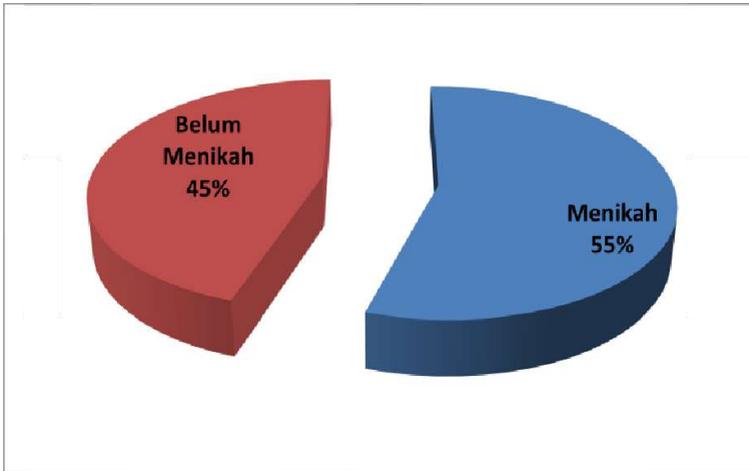




Gambar 6.1
Sebaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan grafik di atas, komposisi responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 59%. Sedangkan untuk responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 41%.

Sebaran komposisi responden berdasarkan status pernikahan dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

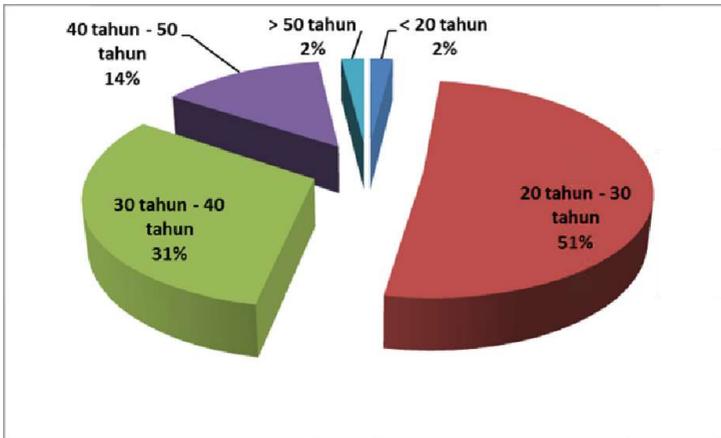


Gambar 6.2
Sebaran Responden Berdasarkan Status Perkawinan

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa jumlah responden yang diamati dalam penelitian ini sebagian besar telah berumah tangga yakni sebanyak 55% dan sisanya sebanyak 45% belum berumah tangga.

2. Usia

Sebanyak responden berdasarkan usia dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



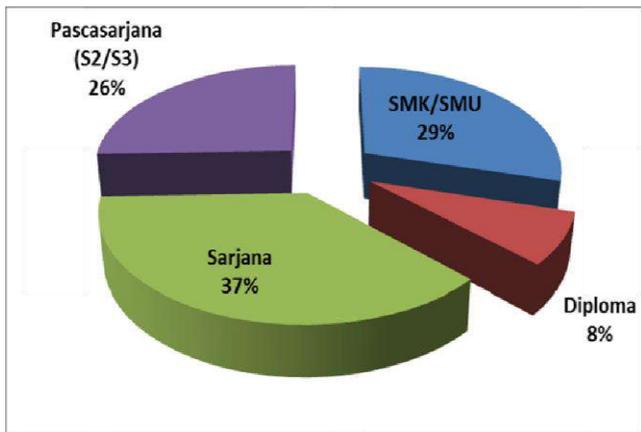
Gambar 6.3
Sebaran Responden Berdasarkan Usia

Dilihat dari komposisi sebaran umur yang dimiliki, responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini didominasi oleh kelompok usia muda (di bawah 40 tahun). Sebanyak 51% berusia antara 20-30 tahun dan

sebanyak 30% berusia antara 30-40 tahun dan sisanya sebanyak 2% berusia di bawah 20 tahun. Adapun responded yang berusia di atas 40 tahun sebanyak 18% yang didominasi oleh responden yang berusia 40-50 tahun sebanyak 14%.

3. Pendidikan

Sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

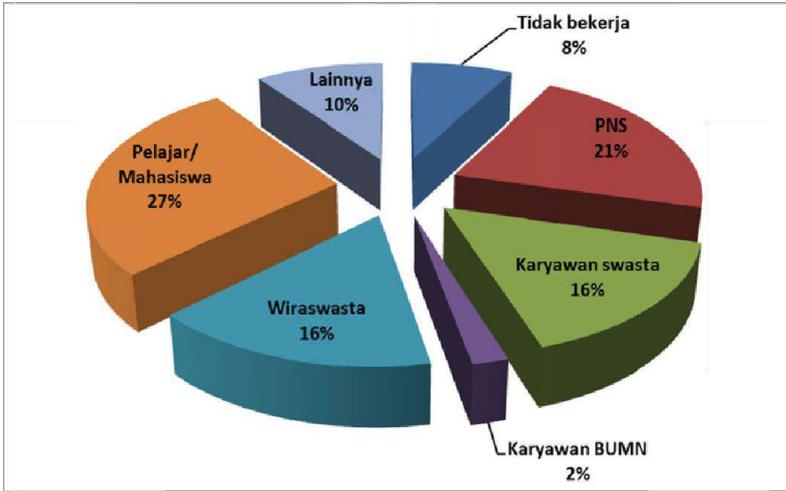


Gambar 6.4
Sebaran Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa sebagian besar responden yang diamati dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan tinggi (diploma, sarjana, maupun pascasarjana). Responden yang berlatar pendidikan Diploma sebanyak 8%, berlatar pendidikan Sarjana sebanyak 37% dan berlatar pendidikan Pasca Sarjana (S2/S3) sebanyak 26 orang, adapun sisanya sebanyak 29% berlatar belakang pendidikan SMA/SMK/Sederajat.

4. Profesi

Sebaran responden berdasarkan profesi yang dijalani saat ini dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



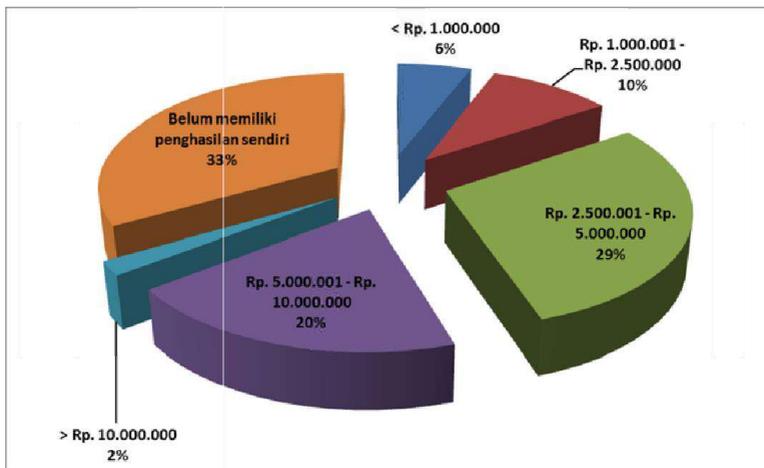
Gambar 6.5
Sebaran Responden Berdasarkan Profesi

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa mayoritas responden yang diamati dalam penelitian ini berprofesi atau berstatus sebagai pelajar/ mahasiswa yakni sebanyak 27%. Selanjutnya sebanyak 21% responded berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), berprofesi sebagai karyawan (swasta maupun BUMN) sebanyak 18%, berprofesi sebagai

wiraswasta sebanyak 16%, dan sebanyak 10% responden berprofesi lainnya (sopir, ibu rumah tangga, dll). Adapun responden yang tidak bekerja sebanyak 8%.

5. Penghasilan Per Bulan

Sebaran responden berdasarkan penghasilan yang diperoleh per bulan dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Gambar 6.6
Sebaran Responden Berdasarkan Penghasilan Per Bulan

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa 67% responden yang diamati telah memiliki penghasilan sendiri sedangkan sisanya sebanyak 37% responden menyatakan belum memiliki penghasilan sendiri atau dengan kata lain masih bergantung pada orang tua/keluarga. Dari 67% responden yang telah memiliki penghasilan sendiri, sebanyak 29% responden memiliki penghasilan antara 2,5 juta–5 jt per bulan, sebanyak 20% berpenghasilan antara 5 juta- 10 juta rupiah per bulan. Sebanyak 10% berpenghasilan antara 1 juta–2,5 juta rupiah perbulan, sebanyak 6 % berpenghasilan di bawah 1 juta rupiah per bulan. Adapun responden yang memiliki penghasilan di atas 10 juta hanya sebanyak 2%.



Bab VII

Rencana Literasi Keuangan Kedepannya

Untuk tahapan selanjutnya, ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh tim peneliti yakni sebagai berikut.

1. Melakukan pengolahan data lanjutan untuk memperdalam hasil analisis. Data lanjutan yang dimaksud adalah data pendukung yang terdapat dalam kuesioner namun belum diolah yang akan memperkuat hasil analisis.
2. Melakukan sosialisasi dan disemenas hasil penelitian terhadap *stakeholder* terkait.



Kegiatan ini juga sekaligus untuk memperoleh tanggapan, korekasi maupun saran yang akan digunakan untuk perbaikan pada laporan akhir nantinya.

3. Melakukan publikasi hasil penelitian pada jurnal *Oikos Nomos* Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo.
4. penelitian terhadap *stakeholder* terkait. Kegiatan ini juga sekaligus untuk memperoleh tanggapan, korekasi maupun saran yang akan digunakan untuk perbaikan pada laporan akhir nantinya.
5. Melakukan publikasi hasil penelitian pada jurnal *Oikos Nomos* Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo.

Bab VIII

Literasi Keuangan di Gorontalo

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan sejauh ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Secara umum tingkat literasi masyarakat Gorontalo terhadap produk keuangan dan investasi dapat dikatakan cukup baik, 2) Untuk produk keuangan konvensional (tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun), literasi masyarakat Gorontalo sudah sangat baik. Namun untuk produk keuangan non-konvensional, tingkat literasi masyarakat Gorontalo masih sangat rendah, 3) Rendahnya literasi masyarakat Gorontalo untuk



produk-produk keuangan non-konvensional ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat mudah untuk tergiur pada tawaran investasi yang menawarkan *return* tinggi.

Daftar Pustaka

Bank Indonesia dan Lembaga Demografi UI. *Financial Literacy Baseline Survey*. Jakarta.

Bank Indonesia. (2013). *Evolusi Kerangka Kebijakan Financial Inclusion*. Jakarta.

Bank Indonesia. (2014). *Booklet Keuangan Inklusif*. Jakarta

Nasution, Chairuddin Syah. (2014). *Kebijakan Keuangan Inklusif: Negara Maju vs Negara Berkembang*. Jakarta.

OECD. 2014. *PISA 2012 Results: Students and Money: Financial Literacy Skills for the 21st Century (Volume VI)*. Programme for International Student Assessment, OECD Publishing.



OJK. (2014). *Sambutan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Pada Gerakan Nasional Cinta (GeNTa) Pasar Modal*. Jakarta.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2013). *Financial Inclusion: Strategi*

Nasional Keuangan Inklusif. Jakarta.

USAID, DEFINIT & SEADI. (2013). *Developing an Financial Literacy Index*. SEADI Discussion Paper No. 11. Jakarta